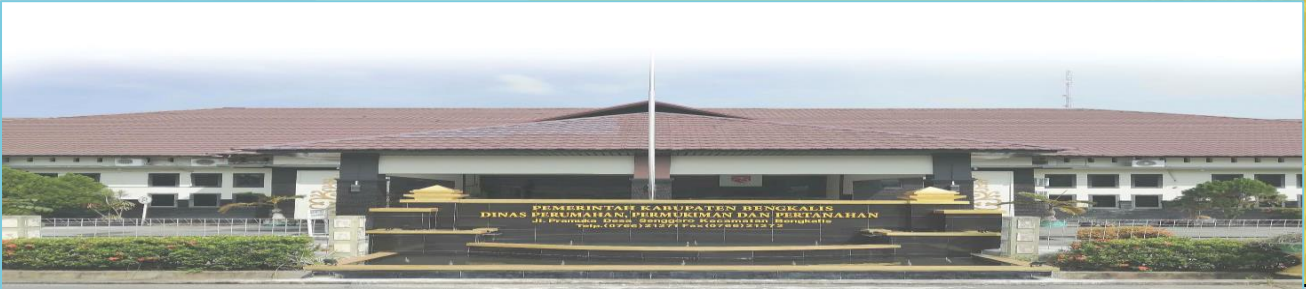




KOTA BENGKALIS

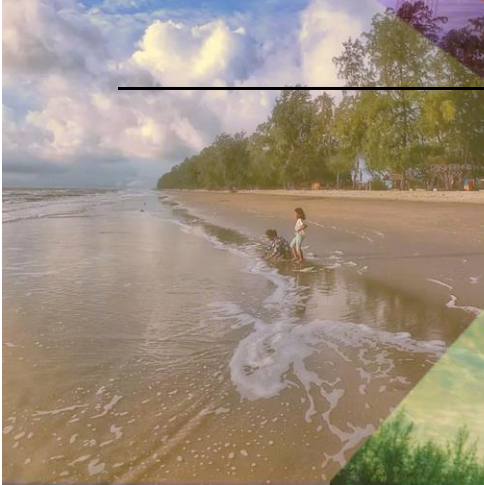


P2KP



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022



KASMARNI, S.Sos., MMP
BUPATI BENGKALIS

H. BAGUS SANTOSO
WAKIL BUPATI BENGKALIS

UNTUK KABUPATEN BENGKALIS BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA



perkinnah.bengkalis.kab.go.id



disperkinnahbks@gmail.com



disperkinnah



dinas perkinnah

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan: Pramuka Desa Senggoro, Gg. Perhubungan Bengkulu Kode Pos: 28714
Telepon: (0766) 21271 Fax: (0766) 21272 e-mail: disperkinnahbks@gmail.com



DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Kata Pengantar.....	4
Bab I	
Pendahuluan	5
a. Latar Belakang.....	5
b. Maksud dan Tujuan.....	5
c. Tugas dan Fungsi.....	5
d. Struktur Organisasi.....	5
Bab II	
Perencanaan Perjanjian Kinerja	8
Bab III	
Akuntabilitas Kinerja	11
a. Pengukuran Kinerja	11
b. Analisis Kinerja.....	11
c. Realisasi Anggaran	32
d. Analisis Efisiensi	33
Bab IV	
Penutup	36



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022	11
Tabel 3.2	Capaian Indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.....	12
Tabel 3.3	PD Berdasarkan Tupoksi Terhadap Pencapaian Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Bengkalis	13
Tabel 3.4	Rekapitulasi Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) 2022	15
Tabel 3.5	Identifikasi Urusan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU).....	16
Tabel 3.6	Realisasi Urusan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis 2022.....	17
Tabel 3.7	Capaian Indikator Rasio Pemukiman Layak Huni Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.....	19
Tabel 3.8	Sumber Dana Pembangunan Rumah Layak Huni tahun 2022	20
Tabel 3.9	Capaian Indikator Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Bengkalis Tahun 2022	20
Tabel 3.10	Luas dan Sebaran Permukiman Kumuh Kabupaten Bengkalis 2022.....	21
Tabel 3.11	Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bengkalis	22
Tabel 3.12	Capaian Indikator Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi Tahun 2022	30
Tabel 3.13	Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022	30
Tabel 3.14	Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.....	31
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022	33
Tabel 3.16	Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Efisiensi Tahun 2022 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis	34



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr Wb

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis melaksanakan pelaporan kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Laporan kinerja merupakan bentuk manifestasi pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direalisasikan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis melalui instrumen perjanjian kinerja Tahun 2022. Penyajian laporan difokuskan pada pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dan analisa serta langkah monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis perangkat daerah dan antisipasi yang dihadapi kedepan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan didalam penyusunan laporan kinerja ini, didalam penyajian dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan, berkesinambungan serta keberkelanjutan optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya.

Bengkalis, Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS



SUPARDI, S.Sos., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710808 199703 1 006

An aerial photograph of a city, likely Bengkalis, showing a large body of water in the foreground. A long pier with several covered walkways extends into the water. In the background, a large building with a dome is visible, surrounded by other buildings and greenery.

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Laporan ini merupakan sebagai bahan evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022. Adapun tujuannya adalah sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

1. Perumusan, penetapan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
2. Perumusan dan penetapan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kepada semua instansi pemerintah dan pihak yang terkait dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas meliputi pelaporan kinerja dan keuangan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun



2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

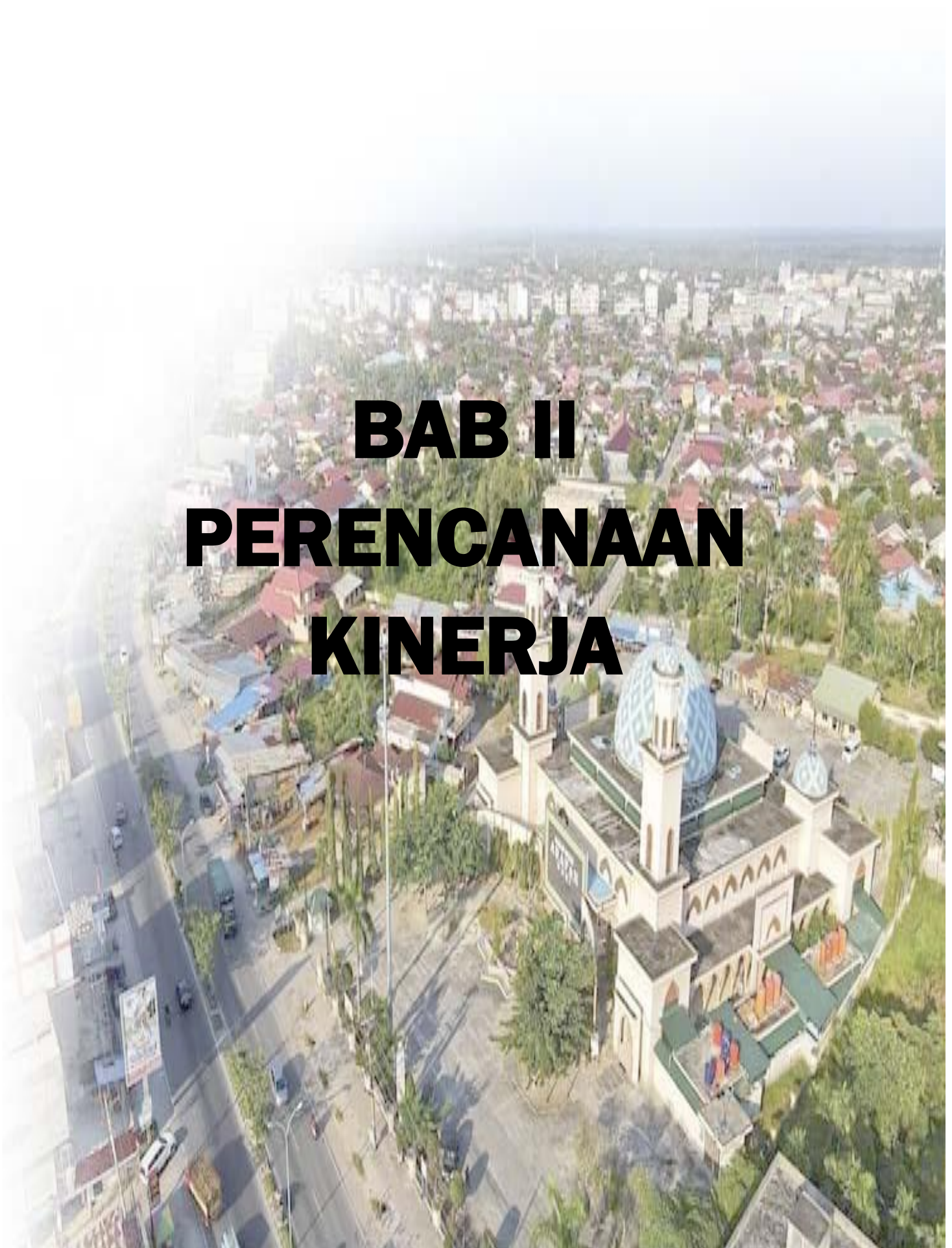
1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
Kelompok JF (JF. Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda)
4. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU), terdiri dari:
Kelompok JF (JF. Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda)
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
Kelompok JF (JF. Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda)
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA





BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis tahun 2022 berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator	Target (Tahun)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya layanan infrastruktur pemukiman yang sehat dan aman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	48,00%	50,00%	52,00%	54,00%	56,00%	58,00%
Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas	Rasio permukiman layak huni	97,85%	97,92%	97,98%	98,05%	98,11%	98,18%
	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	4,28%	4,15%	4,02%	3,89%	3,76%	3,63%
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
Meningkatnya Kontribusi non migas terhadap perekonomian daerah	Penyelesaian izin lokasi	Na	15%	16%	18%	20%	25%
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Na	5,00%	8,00%	11,00%	14,00%	17,00%
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Na	8%	16%	24%	32%	40%
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B	BB	BB	BB	A	A

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 (diolah).



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target
Tersedianya layanan infrastruktur pemukiman yang sehat dan aman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	50%
Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas	Rasio permukiman layak huni	97,92%
	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	4,15%
Meningkatnya Kontribusi non migas terhadap perekonomian daerah	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	5%
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	BB

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 (diolah).



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari dasar untuk menghitung sampai sejauh mana tingkat keberhasilan didalam memenuhi target terhadap realisasi pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) Tahun.

Untuk mengetahui realisasi dan capaian dari pengukuran kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis 2022

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya layanan infrastruktur pemukiman yang sehat dan aman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	50%	49,68%	99,36%
Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas	Rasio permukiman layak huni	97,92%	100,34%	102,47%
	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	4,15%	3,48%	83,86%
Meningkatnya Kontribusi non migas terhadap perekonomian daerah	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	5%	1%	20,00%
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	BB (70)	BB (72,96)	BB (104,23%)
		RATA-RATA		84,92%

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 (diolah).

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rata-rata persentase capaian indikator kinerja Dinas Perumahan,



Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis tahun 2022 adalah 84,92% dan termasuk dalam kategori baik. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, 4 (empat) indikator dengan rata-rata capaian diatas 98% dan 1 (satu) indikator rata-rata capaian dibawah 50% dari target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis mampu melaksanakan tanggungjawab kinerja yang telah dijanjikan. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

SASARAN 1 | Tersedianya layanan infrastruktur pemukiman yang sehat dan aman

Tabel. 3.2
Capaian Indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

Indikator	2021	2022		
	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU)	107,53	50	49,68	99,36
Rata-rata capaian				99,36

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 (diolah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan” adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Definisi tersebut dapat dilihat bahwa prasarana, sarana, dan utilitas umum menjadi salah satu aspek yang menentukan suatu perumahan layak huni atau tidak serta lingkungan yang sehat dan aman.

Sedangkan yang dimaksud dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 pada Pasal 1 angka 21 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b adalah : **Prasarana** adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal layak, sehat, aman, dan nyaman, paling sedikit terdiri dari **jalan, drainase, sanitasi dan jaringan air minum, Sarana** adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung



penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, paling sedikit terdiri dari *Ruang Terbuka Hijau (RTH)* dan **rumah ibadah komunitas** dan **Utilitas Umum** adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian, paling sedikit terdiri dari **jaringan listrik termasuk Kwh meter, dan jaringan telepon.**

Dalam pemenuhan indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) melibatkan beberapa Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun PD yang dilibatkan didalam penyediaan PSU di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel.3.3
PD Berdasarkan Tupoksi Terhadap Pencapaian Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Bengkalis 2022

No	Perangkat Daerah	Prasarana	Sarana	Utilitas Umum	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis	Drainase Sekunder Sanitasi Komunal dan Sanitasi Perumahan			Tahun 2021 menjadi wewenang PUPR (sebelumnya Disperkimnah)
		Jaringa Air Minum Perkotaan dan Perdesaan			
2.	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimnah) Kabupaten Bengkalis	Jalan Kawasan Permukiman Drainase Tersier	Rumah Ibadah Komunitas		Tahun 2022 wewenang Disperkimnah
3.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis	Persampahan (TPS)			
4.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bengkalis			Jaringan Telepon Nirkabel/BTS	
5.	Bagian Perekonomian Setda Kaupaten Bengkals			Jaringan Listrik Pemerintah/PLN	

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 (diolah).

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, peran tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam pemenuhan indikator Cakupan PSU menyesuaikan kewenangan yang diatur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Sehubungan hal tersebut, untuk menghitung target indikator kinerja cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis menggunakan data jumlah pembangunan dari komponen Prasarana (Jalan dan



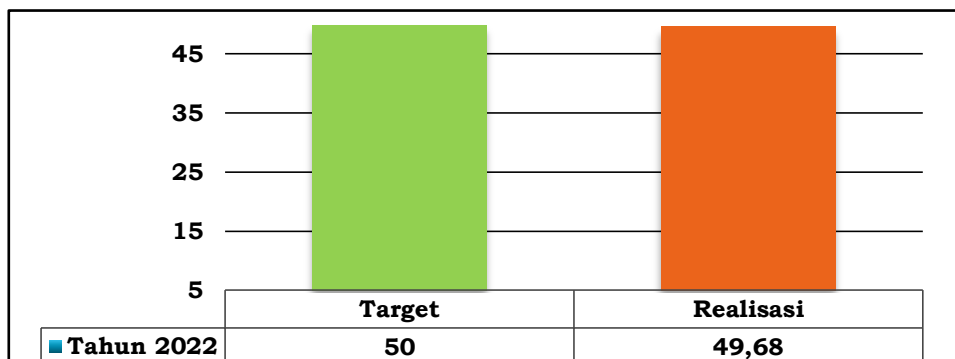
drainase) dan sarana (rumah ibadah) sedangkan untuk Utilitas Umum tidak dilakukan penghitungan karena bukan lagi menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Hal ini juga dikarenakan adanya implementasi aturan Permendagri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diperkuat dengan aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan dimaksud diatas, indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU bahwa: Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu dibagi dengan Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu.

Dapat dianalisa bahwa Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu adalah Desa/Kelurahan pada 11 Kecamatan (155 Kelurahan/Desa) di Kabupaten Bengkalis yang telah didukung oleh cakupan PSU dibagi dengan (155 Kelurahan/Desa) di Kabupaten Bengkalis.

Grafik.3.1
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman
yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2022



Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 (diolah).

Berdasarkan pemaparan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) diatas, untuk mengetahui jumlah



lingkungan (Kelurahan/Desa) yang didukung PSU kurun waktu tertentu dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel.3.4
 Rekapitulasi Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Kelurahan/Desa yang Didukung PSU	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bengkalis	31	17	
2.	Bantan	23	13	
3.	Siak Kecil	17	7	
4.	Bukit Batu	10	5	
5.	Bandar Laksamana	7	3	
6.	Rupat	16	9	
7.	Rupat Utara	8	1	
8.	Mandau	11	7	
9.	Bathin Solapan	13	6	
10.	Pinggir	10	5	
11.	Talang Muandau	9	4	
J U M L A H		155	77	

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 (diolah).

Berdasarkan tabel 3.4, Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Tahun 2022 telah terpenuhi dari 155 Kelurahan/Desa terealisasi sebanyak 77 Kelurahan/Desa yang memenuhi aspek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.





Tabel.3.5
 Realisasi Urusan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman
 yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU)
 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis 2022

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)						
Prasarana					Sarana	
Jalan Kawasan Permukiman (M ¹)					Drainase(M ¹)	Rumah Ibadah (Unit)
Badan Jalan	Penimbunan (Base)	Burda	Semenisasi	Hotmix	Parit Lingkungan	Rumah Ibadah Komunitas
-	12.321,44	8.125,27	47.915,79	6.795,41	13.630,04	224

Ket: Sumber Data : Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU Tahun 2022 (diolah).

Tabel.3.6
 Realisasi Anggaran Cakupan lingkungan yang sehat dan aman
 yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU)
 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis 2022

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)						
Prasarana					Sarana	
Jalan Kawasan Permukiman (Rp)					Drainase(Rp)	Rumah Ibadah (Rp)
Badan Jalan	Penimbunan (Base)	Burda	Semenisasi	Hotmix	Parit Lingkungan	Rumah Ibadah Komunitas
-	15.520.000.000	4.200.000.000	71.304.000.000	11.298.000.000	16.655.000.000	29.074.000.000

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 (diolah).



Berdasarkan tabel 3.5 dan 3.6 diatas, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 telah merealisasikan pembangunan dan peningkatan antara lain:

- a. Pembangunan dan Peningkatan Prasarana jalan yakni pembangunan jalan kawasan permukiman terealisasi sepanjang 75.157,91 M¹ dengan alokasi anggaran sebesar Rp.102.052.000000,- (seratus dua milyar lima puluh dua juta rupiah) terdiri atas pekerjaan peningkatan dan pembangunan penimbunan (base), burda, semenisasi dan hotmix.
- b. Pembangunan dan Peningkatan Prasarana drainase (parit lingkungan) terealisasi sepanjang 13.630,04 M¹ dengan alokasi anggaran Rp. 16.655.000.000,- (enam belas milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
- c. Pembangunan dan Peningkatan sarana berupa rumah ibadah komunitas terealisasi sebanyak sepanjang 224 unit dengan alokasi anggaran Rp. 29.074.000.000,- (dua puluh Sembilan milyar tujuh puluh empat juta rupiah).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- a. PSU merupakan satu kesatuan yang memiliki andil penting (vital) bagi meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman di Kabupaten Bengkalis, selain itu bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam mengejar ketertinggalan penyediaan infrastruktur khususnya pada kawasan permukiman diwujudkan dengan apresiasi penuh serta dukungan dari berbagai pihak (*stockholder*) dan masyarakat;
- b. Ketersediaan alokasi anggaran yang mencukupi dan didukung SDM aparatur pemerintah merupakan nilai tambah dalam mewujudkan program dan kegiatan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
- c. Dukungan dari pihak legislatif dalam mengalokasikan hasil reses masyarakat dalam pembangunan PSU sangat signifikan, sehingga penetrasi cakupan PSU di Kabupaten Bengkalis diharapkan setiap tahunnya semakin meningkat.

Permasalahan/Hambatan

- a. Proses integrasi Perangkat Daerah (PD) didalam memenuhi ketercakupan PSU, khususnya mengenai rentang koordinasi pemenuhan cakupan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang dilibatkan didalam capaian target yang telah ditetapkan belum optimal.
- b. Pembangunan Cakupan PSU di Kabupaten sering dihadapi dilema lapangan berupa disparitas harga meterial yang signifikan antara wilayah darat dan kepulauan serta jauh dekat sumber material dan kendala cuaca yang sangat sulit diprediksi terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis.
- c. Anggaran yang dipersiapkan untuk mendukung pembangunan PSU mengalami penurunan setiap tahunnya, sejalan dengan melemahnya kondisi ekonomi global yang juga mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah.



Solusi/Strategi Pemecahan masalah

- Perlu digesa cakupan pemerataan desa/kelurahan yang terpenuhi layanan PSU dengan melihat skala prioritas khususnya pada wilayah yang strategis dan memiliki dampak langsung dalam pelaksanaan pembangunan.
- Perlu langkah evaluasi dan strategi harus dilakukan khususnya Kelurahan/Desa yang masih jauh dari pelayanan pemenuhan PSU di Kabupaten Bengkalis.
- Kerja keras Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam merangkul perangkat daerah terkait guna penyamaan persepsi terhadap tugas dan fungsi khususnya menghindari *overlapping* (tumpang tindih) penataan kawasan permukiman yang tercakup dalam PSU serta meneliti kembali wilayah yang menjadi sasaran pembangunan PSU di Kabupaten Bengkalis.

SASARAN 2 | **Tertatanya Kawasan Permukiman yang Berkualitas**

Tabel. 3.7
Capaian Indikator Rasio Pemukiman Layak Huni
Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

Indikator	2021	2022		
	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rasio Pemukiman Layak Huni	100,31	97,92	100,34	102,47
Rata-rata capaian				102,47

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat bahwa capaian indikator rasio permukiman layak huni pada tahun 2022 adalah 102,47% sedangkan pada tahun 2021 capaian indikator ini sebesar 100,31%, hal ini menggambarkan bahwa peningkatan luasan permukiman layak huni di Kabupaten Bengkalis bertambah setiap tahunnya. Tahun 2022 cakupan luasan permukiman layak huni ditargetkan sebesar 97,92% atau 15.154,83 ha dan dapat direalisasikan sebesar 100,34% atau 15.206,73 ha.

Sedangkan pada tahun 2021 luasan permukiman layak huni di Kabupaten Bengkalis tercatat sebesar 15.192,09 ha. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 terjadi penambahan luasan permukiman layak huni sebesar 14,63 ha yang tersebar di wilayah kecamatan dalam Kabupaten Bengkalis.

Dalam upaya meningkatkan taraf hunian masyarakat Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan rumah layak huni dan perbaikan rumah tidak layak huni dengan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan, Bantuan Keuangan (BanKeu) Propinsi Riau Bidang Perumahan



dan *sharing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 10.011.840.000,- (*Sepuluh milyar sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8
Sumber Dana Pembangunan Rumah Layak Huni tahun 2022

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Sumber Dana	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH)	36	unit	DAK	3.431.340.000
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	77	unit	BanKeu	5.120.500.000
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	73	unit	APBD	1.460.000.000
TOTAL		186			10.011.840.000

Peningkatan cakupan luasan permukiman layak huni berkaitan dengan pengurangan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis, apabila terjadi pengurangan ataupun penambahan liasan lingkungan permukiman kumuh maka akan mengakibatkan berkurang ataupun bertambahnya cakupan luasan permukiman layak huni di Kabupaten Bengkalis.

Untuk mencapai sasaran tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis juga menghitung persentase lingkungan permukiman kumuh seperti pada tabel 3.9 dibawah ini. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: "*Penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang*" dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lampiran huruf D No. 2 dan 3 tentang pembagian urusan "*Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 ha pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Kabupaten/Kota*".

Tabel 3.9.
Capaian Indikator Persentase Lingkungan
Permukiman Kumuh Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

Indikator	2021	2022		
	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Lingkungan permukiman kumuh	85,78	4,15	3,48	83,86
Rata-rata capaian				83,86

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 (diolah)

Indikator persentase lingkungan permukiman kumuh semakin baik apabila realisasi yang diperoleh lebih kecil dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena realisasi yang diperoleh menggambarkan keberhasilan dalam mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh di daerah.



Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis nomor 236/KPTS/III/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2021, luas permukiman kumuh adalah 342,37 ha. Kabupaten Bengkalis berupaya meningkatkan kawasan permukiman layak huni dengan salah satu cara mengurangi luasan permukiman kumuh yang tersebar di wilayah kecamatan. Pada tahun 2021 luasan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis telah mengalami pengurangan sebesar 57,26 ha sehingga menjadi 285,11 ha.

Tahun 2022 target yang ditetapkan untuk persentase lingkungan permukiman kumuh sebesar 4,15% atau 322,37 ha dengan luas wilayah keseluruhan adalah 777,93 ha, sedangkan realisasi sebesar 3,48% atau 270,48 ha seperti pada tabel 3.9 diatas. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, luasan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis berkurang sebesar 14,63 ha di tahun 2022, dengan rincian sebaran sebagai berikut :

Tabel 3.10
Luas dan Sebaran Permukiman Kumuh Kabupaten Bengkalis 2022

NO	Nama Kawasan	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas Kawasan Kumuh (ha)	Capaian Pengurangan Kumuh (ha)	Sisa Luasan Kumuh (ha)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kawasan Perkotaan Bengkalis - Parit Bangkung	Bengkalis	Damon	5,21	0,00	5,21
2	Kawasan Perkotaan Bengkalis - Cik Ma Ayu	Bengkalis	Rimba Sekampung	13,00	0,00	13,00
3	Pantai Indah Selat Baru	Bantan	Selat Baru	30,67	0,00	30,67
4	Batu Panjang	Rupat	Batu Panjang	25,38	2,72	22,66
5	Pemukiman Nelayan Tanjung Medang	Rupat Utara	Tanjung Medang	15,00	0,00	15,00
6	Kawasan Perkotaan Duri - Duri Barat	Mandau	Duri Barat	1,95	1,95	0,00
7	Kawasan Perkotaan Duri - Balik Alam	Mandau	Balik Alam	4,34	0,00	4,34
8	Kawasan Perkotaan Duri - Talang Mandi	Mandau	Talang Mandi	16,19	0,00	16,19
9	Kawasan Perkotaan Duri - Pematang Pudu	Mandau	Pematang Pudu	20,50	0,00	20,50
10	Kawasan Perkotaan Duri - Air Jamban	Mandau	Air Jamban	21,41	0,00	21,41
11	Kawasan Perkotaan Duri - Babussalam	Mandau	Babussalam	16,53	0,00	16,53
12	Kawasan Perkotaan Duri - Duri Timur	Mandau	Duri Timur	8,79	0,00	8,79
13	Kawasan Perkotaan Duri - Gajah Sakti	Mandau	Gaja Sakti	18,71	0,00	18,71
14	Sebangar	Bathin Solapan	Sebangar	5,43	0,00	5,43
15	Balai Makam	Bathin Solapan	Balai Makam	14,29	2,35	11,94
16	Petani	Bathin Solapan	Petani	6,63	6,63	0,00
17	Bumbung	Bathin Solapan	Bumbung	5,29	0,00	5,29
18	Kesumbo Ampai	Bathin Solapan	Kesumbo Ampai	12,52	0,00	12,52
19	Pinggir	Pinggir	Pinggir	4,22	0,98	3,24
20	Pasar Sungai Pakning	Bukit Batu	Sungai Pakning	7,19	0,00	7,19
21	Pasar Baru Lubuk Muda	Siak Kecil	Lubuk Muda	31,86	0,00	31,86
TOTAL				285,11	14,63	270,48

Sumber : Kelompok Kerja Pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Bengkalis 2022



Tabel. 3.11
Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Bengkulu

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administratif				Kependudukan		Kekumuhan		Pertimbangan Lain		Legalitas Tanah	Prioritas
			RT/RW	Kode Kel/Desa	Kel/Desa	Kecamatan	Jumlah (jiwa)	Kepadatan (jiwa/ha)	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Kawasan Perkotaan Bengkulu - Parit Bangkung	0,88	RT001-RW001	14080414	Damon	Bengkalis	199	226	16	Kumuh Ringan	7	Sedang	Ilegal	C4/6
		0,67	RT002-RW001	14080414			146	218	20	Kumuh Ringan	7	Sedang	Ilegal	C4/6
		0,89	RT003-RW001	14080414			135	152	17	Kumuh Ringan	5	Sedang	Ilegal	C4/6
		2,03	RT004-RW001	14080414			148	73	17	Kumuh Ringan	3	Rendah	Tidak Ada/Tidak Tahu	C6/9
		0,74	RT001-RW003	14080414			303	409	22	Kumuh Ringan	7	Sedang	Tidak Ada/Tidak Tahu	C4/6
		5,21					931							
2	Kawasan Perkotaan Bengkulu - Cik Mas Ayu	4,00	RT003-RW001	14080411	Rimba Sekampung	Bengkalis	310	78	17	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		4,00	RT002-RW002	14080411			298	75	17	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		1,00	RT005-RW002	14080411			225	225	21	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Ilegal	C2/3
		4,00	RT006-RW002	14080411			331	83	18	Kumuh Ringan	7	Sedang	Ilegal	C4/6
		13,00					1164							
3	Pantai Indah Selat Baru	5,94	RT001-RW014	14085007	Selat Baru	Bantan	158	27	35	Kumuh Ringan	7	Sedang	Tidak Ada/Tidak Tahu	C4/6
		3,98	RT001-RW015	14085007			119	30	36	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		7,87	RT001-RW013	14085007			231	29	36	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		3,98	RT002-RW013	14085007			129	32	32	Kumuh Ringan	7	Sedang	Tidak Ada/Tidak Tahu	C4/6
		4,40	RT002-RW014	14085007			130	30	39	Kumuh Sedang	7	Sedang	Legal	C3/6
		4,50	RT002-RW015	14085007			111	25	30	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		30,67					878							
4	Batu Panjang	4,60	RT001-RW001	14083002	Batu Panjang	Rupat	256	56	20	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		2,72	RT002-RW001	14083002			108	40	30	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		3,06	RT003-RW001	14083002			126	41	34	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6



		4,90	RT004-RW001	14083002			242	49	34	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		9,24	RT005-RW001	14083002			205	22	37	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		5,46	RT008-RW001	14083002			147	27	30	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		29,98					1084							
5	Permukiman Nelayan Tanjung Medang	4,50	RT001-RW001	14083102	Desa Tanjung Medang	Rupat Utara	334	74	29	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		4,60	RT002-RW001	14083102			471	102	27	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		3,50	RT003-RW002	14083102			354	101	30	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		2,40	RT005-RW003	14083102			326	136	30	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		15,00					1485							
6	Kawasan Perkotaan Duri - Duri Barat	1,95	RT003-RW013	14080110	Duri Barat	Mandau	215	110	17	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
		1,95					215							
7	Kawasan Perkotaan Duri - Balik Alam	1,77	RT003-RW006	14080111	Balik Alam	Mandau	244	138	17	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		0,72	RT001-RW007	14080111			143	199	16	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
		1,85	RT004-RW007	14080111			148	80	16	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		4,34					535							
8	Kawasan Perkotaan Duri - Talang Mandi	2,05	RT002-RW002	14080113	Talang Mandi	Mandau	315	154	20	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
		1,12	RT003-RW002	14080113			218	195	26	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
		1,72	RT004-RW002	14080113			364	212	21	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
		1,53	RT001-RW003	14080113			199	130	28	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		1,88	RT002-RW003	14080113			222	118	27	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		2,85	RT003-RW003	14080113			203	71	23	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		1,25	RT004-RW003	14080113			219	175	27	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
		1,11	RT005-RW003	14080113			378	341	23	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
		0,75	RT004-RW010	14080113			211	281	28	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
		1,93	RT002-RW014	14080113			248	128	27	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
		16,19					2577							
9	Kawasan Perkotaan Duri	2,50	RT002-RW010	14080104	Pematang Pudu	Mandau	153	61	26	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6



	- Pematang Pudu	5,00	RT001-RW013	14080104			125	25	30	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		5,00	RT002-RW013	14080104			235	47	31	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		5,00	RT003-RW013	14080104			255	51	34	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		3,00	RT004-RW013	14080104			202	67	35	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		20,50					970							
10	Kawasan Perkotaan Duri - Air Jamban	2,17	RT004-RW002	14080103	Air Jamban	Mandau	253	117	24	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		3,43	RT001-RW003	14080103			511	149	19	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		0,72	RT002-RW003	14080103			284	394	24	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
		1,27	RT003-RW003	14080103			395	311	34	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
		0,73	RT004-RW003	14080103			306	419	27	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
		2,19	RT005-RW003	14080103			324	148	21	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
		1,71	RT006-RW003	14080103			235	137	21	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
		1,77	RT001-RW007	14080103			180	102	23	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		1,43	RT002-RW007	14080103			195	136	26	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		2,59	RT003-RW007	14080103			313	121	24	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
		0,94	RT006-RW007	14080103			221	235	21	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
		2,47	RT007-RW007	14080103			189	77	29	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		0,62	RT001-RW009	14080103			438	706	24	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
		1,37	RT002-RW009	14080103			258	188	31	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
		1,16	RT005-RW009	14080103			486	419	26	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
		1,88	RT005-RW010	14080103			510	271	28	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
		0,76	RT001-RW011	14080103			345	454	23	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
		7,88	RT003-RW011	14080103			214	27	20	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		0,94	RT004-RW011	14080103			224	238	23	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
		1,39	RT005-RW011	14080103			285	205	18	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
1,59	RT006-RW011	14080103	266	167	26	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6				



		8,23	RT005-RW016	14080103			340	41	21	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		2,11	RT006-RW017	14080103			258	122	21	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		3,02	RT001-RW022	14080103			215	71	23	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
		9,51	RT002-RW022	14080103			193	20	31	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		61,88					7438							
11	Kawasan Perkotaan Duri - Babussalam	1,94	RT002-RW001	14080114	Babussalam	Mandau	206	106	33	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		0,99	RT002-RW002	14080114			352	356	30	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
		1,66	RT009-RW002	14080114			445	268	25	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
		1,77	RT003-RW003	14080114			213	120	23	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		3,93	RT001-RW006	14080114			279	71	22	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		2,70	RT001-RW008	14080114			276	102	32	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		2,04	RT003-RW008	14080114			203	100	33	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		1,50	RT005-RW008	14080114			202	135	31	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		16,53					2176							
12	Kawasan Perkotaan Duri - Duri Timur	1,79	RT002-RW001	14080109	Duri Timur	Mandau	240	134	16	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		1,00	RT003-RW001	14080109			128	128	20	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		3,00	RT003-RW005	14080109			243	81	22	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		3,00	RT004-RW005	14080109			309	103	28	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		1,50	RT005-RW005	14080109			204	136	16	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		10,29					1124							
13	Kawasan Perkotaan Duri - Gajah Sakti	2,99	RT002-RW002	14080112	Gajah Sakti	Mandau	173	58	19	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		0,61	RT001-RW005	14080112			98	161	16	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		0,48	RT002-RW005	14080112			131	273	18	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		1,00	RT003-RW005	14080112			139	139	19	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		1,51	RT004-RW005	14080112			93	62	18	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		0,85	RT005-RW005	14080112			154	181	21	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		1,47	RT001-RW007	14080112			150	102	19	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6



									Ringan				
		1,07	RT002-RW007	14080112					Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		0,83	RT003-RW007	14080112			220	206	16	19	7	Sedang	Legal
		1,82	RT004-RW007	14080112			119	143	19	20	7	Sedang	Legal
		1,83	RT005-RW007	14080112			150	82	20	22	7	Sedang	Legal
		4,25	RT003-RW009	14080112			150	82	22	24	7	Sedang	Legal
		18,71					1897						
14	Sebangar	0,99	RT003-RW005	14080108	Sebangar	Bathin Solapan	203	205	24		7	Sedang	Legal
		4,44	RT002-RW007	14080108			345	78	35		9	Sedang	Legal
		5,43					548						
15	Balai Makam	1,32	RT001-RW004	14080107	Balai Makam	Bathin Solapan	291	220	30		11	Tinggi	Legal
		1,62	RT002-RW004	14080107			139	86	24		9	Sedang	Legal
		0,30	RT005-RW004	14080107			183	610	28		11	Tinggi	Legal
		0,31	RT001-RW005	14080107			210	677	25		11	Tinggi	Legal
		0,73	RT002-RW005	14080107			169	232	21		11	Tinggi	Legal
		1,52	RT003-RW005	14080107			180	118	26		7	Sedang	Legal
		0,69	RT004-RW005	14080107			170	246	28		11	Tinggi	Legal
		0,76	RT005-RW005	14080107			152	200	23		9	Sedang	Legal
		1,22	RT001-RW007	14080107			214	175	26		9	Sedang	Legal
		1,82	RT002-RW007	14080107			159	87	28		7	Sedang	Legal
		4,00	RT003-RW007	14080107			237	59	28		7	Sedang	Legal
		14,29					2104						
16	Petani	6,63	RT002-RW001	14080106	Petani	Bathin Solapan	283	43	31		7	Sedang	Legal
		6,63					283						
17	Bumbang	2,38	RT001-RW001	14080102	Bumbang	Bathin Solapan	495	208	25		9	Sedang	Legal
		2,91	RT003-RW002	14080102			89	31	30		7	Sedang	Legal
		5,29					584						



18	Kesumbo Ampai	5,90	RT002-RW002	14080105	Kesumbo Ampai	Bathin Solapan	84	14	31	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		6,62	RT001-RW004	14080105			263	40	31	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		12,52					347							
19	Pinggir	4,22	RT001-RW002	n.a	Pinggir	Pinggir	387	92	38	Kumuh Sedang	7	Sedang	Legal	C3/6
			RT002-RW002											
			RT003-RW002											
			RT004-RW002											
20	Pasar Sungai Pakning	17,88	RT001-RW001	n.a	Sungai Pakning	Bukit Batu	1732	97	36	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
			RT003-RW001											
			RT002-RW002											
			RT003-RW002											
			RT001-RW003											
			RT002-RW003											
RT003-RW003														
21	Pasar Lubuk Muda	31,86	n.a	n.a	Lubuk Muda (Dusun Melati, Dusun Melati Barat dan Dusun Muda Jaya)	Siak Kecil	313	10	36	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
	Total Luas Kumuh	342,37												

Sumber Data: Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 236/KPTS/III/2021.

LAKIP 2022

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis





Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- a. Dukungan serta keseriusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menuntaskan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis berupa aturan payung hukum melalui Keputusan Bupati Nomor: 236/KPTS/III/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis dengan menetapkan 21 (dua puluh satu) lokasi, di 9 (sembilan) Kecamatan.;
- b. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Riau didalam menjemput Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang permukiman dan Bantuan Keuangan Bidang Permukiman menjadi agenda dan prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Permasalahan/Hambatan

- a. Kesiapan masyarakat didalam menerima program penanganan dan penataan kawasan permukiman kumuh menjadi kendala, khususnya wilayah yang mempertahankan kondisi daerah yang diinginkan;
- b. Luas wilayah yang menjadi fokus penataan menjadi hambatan tersendiri, khususnya kondisi geografis yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- c. Jumlah penduduk miskin/berpenghasilan rendah setiap tahun semakin naik, ditambah dengan kondisi ekonomi global dan deraan wabah Covid-19 membuat permintaan ketersediaan RLH bagi masyarakat semakin tinggi;
- d. Perubahan/aturan dari Pemerintah Pusat dan maupun kebijakan Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan RLH bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

- a. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan penetapan SK Kawasan Permukiman Kumuh menjadi tolok ukur didalam keberhasilan penataan kawasan permukiman kumuh yang telah disepakati bersama;
- b. Dukungan komponen masyarakat, pemerintah desa/kelurahan setempat sangat dibutuhkan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh terutama menyakut penetapan penerima, aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
- c. Pemerataan didalam pendataan calon peneriman RLH maupun rehab rumah pada kawasan permukiman kumuh harus lebih diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih antara program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bengkalis.
- d. Melakukan pemutakhiran data (*updating*) calon penerima RLH, agar tidak terjadi salah sasaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di lapangan.



Gambar 3.1
Rumah Layak Huni Kabupaten Bengkalis



SASARAN 3 Meningkatkan Kontribusi non Migas Terhadap Perekonomian Daerah

Tabel. 3.12
Capaian Indikator Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi Tahun 2022

Indikator	2021	2022		
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	n/a	5	1	20
Rata-rata capaian				20

Tabel. 3.13
Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

No	Kecamatan	Permasalahan	Status	Ket
1	2	3	4	5
1	Kec. Batin Sholapan	Sengketa tanah TPA di Desa Sebangar	Belum selesai	
2	Kec. Mandau	Status Tanah Kantor UPT Perumahan dan Utilitas Prasarana dan Sarana Umum	Sudah selesai	
3	Kec. Rumat	Sengketa tanah kelompok tani dengan PT. SRL	Belum selesai	
4	Kec. Pinggir	Penegasan batas daerah antara Kec. Mandau dan Pinggir	Belum selesai	
5	Kec. Talang Muandau	Penegasan Batas Daerah Tebing Serai antara Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak Sri Indrapura	Belum selesai	

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 (Data diolah)



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- a. Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelesaian konflik pertanahan melalui ketersediaan dana tanggap terhadap langkah konkrit dan ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sangat konsen terhadap mediasi antara pihak-pihak yang terlibat didalam penyelesaian konflik melalui pendekatan-pendekatan preventif.

Permasalahan/Hambatan

- a. Luasnya wilayah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang tersebar di seluruh Kecamatan merupakan tantangan tersendiri didalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Minimnya ketersediaan SDM, serta proses hukum didalam penyelesaian konflik butuh koordinasi dan waktu yang lama didalam menuntaskan konflik Kabupaten Bengkalis melalui instansi terkait.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

- a. Perlu dilakukan langkah konkrit dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap, sehingga pelaksanaan mediasi, proses pemantauan kondisi lapangan dan langkah preventif yang harus diambil;
- b. Dukungan seluruh *stakeholder* didalam mencari solusi terhadap penyelesaian konflik melibatkan masyarakat, pihak dunia usaha maupun dengan Pemerintah Daerah.

SASARAN 4 ||| Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintah

Tabel. 3.14
Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

Indikator	2021	2022		
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB	BB (70)	BB (72,96)	Tercapai (104,23)
Rata-rata capaian				104,23



Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis yang secara umum bertujuan mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi perangkat daerah. Komponen yang menjadi penilaian dalam evaluasi AKIP adalah 1) perencanaan kinerja (30%), 2) pengukuran kinerja (30%), 3) pelaporan kinerja (15%) dan 4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

Nilai dan prediket yang diberikan berdasarkan akumulasi nilai pemenuhan kualitas dan kriteria masing-masing komponen, sebagai berikut :

1. Prediket AA dengan nilai 90 – 100
2. Prediket A dengan nilai 80 – 90
3. Prediket BB dengan nilai 70 – 80
4. Prediket B dengan nilai 60 – 70
5. Prediket CC dengan nilai 50 – 60
6. Prediket C dengan nilai 30 – 50
7. Prediket D dengan nilai 0 – 30

Berdasarkan tabel 3.14 diatas, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis menetapkan target Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 adalah BB dengan realisasi BB dan prediket capaian *tercapai*, sedangkan berdasarkan besaran nilai yang targetkan yaitu 70 terealisasi sebesar 72,96 atau 104,23%. Hal ini menggambarkan bahwa Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah mewujudkan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan pengukuran kinerja telah dilaksanakan sampai level eselon 3 (pejabat administrator).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- a. Keseriusan dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan capaian Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk memantapkan laporan yang akuntabel dengan melibatkan seluruh *stockholder* yang dalam ini OPD startegis urusan wajib dan pelayanan sehingga mendukung kinerja Pemerintah Daerah serta transparansi dalam memenuhi seluruh tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan;
- b. Dukungan anggaran pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sangat signifikan.

Permasalahan/Hambatan

- a. Keterbatasan SDM dan dinamisasi organisasi menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan serius oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dimana keberlanjutan didalam mempersiapkan laporan Akuntabilitas Kinerja membutuhkan SDM yang cakap dan kredibel;



- b. Hambatan didalam tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan membutuhkan langkah yang preventif didalam melaksanakan penyerapan anggaran, pengawasan dan sosialisasi hasil pemeriksaan ditindaklanjut.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

- a. Perlu dilakukan langkah konkrit berupa kesiapan SDM dan aparatur kredibel didalam melaksanakan tranparansi akuntabilitas kinerja melalui laporan yang akurat, efisien dan tepat sasaran didalam menggambarkan akuntabilitas capaian realisasi capaian program dan kegiatan;
- b. Dibutuhkan langkah preventif didalam mempertahankan segala tindaklanjut hasil temuan didalam memenuhi target.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 Rp. 199.424.988.127,- dengan realisasi keuangan sebesar RP. 185.466.704.504,- atau 93,00% dan realisasi fisik sebesar 98,28%.

Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU sebesar: 95,33%, sementara penyerapan anggaran terendah pada indikator Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi sebesar: 58,70% Adapun rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2022 dapat dilihat Tabel 3.15 berikut ini :

Tabel. 3.15

Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

Indikator Kinerja	Anggaran		
	Target	Realisasi	(%)
(1)	(3)	(4)	(5)
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU	162.626.443.600	155.038.774.807	95,33
Rasio pemukiman layak huni	1.464.768.900	1.097.766.974	74,95
Persentase lingkungan permukiman kumuh	14.323.126.900	12.976.655.753	90,60
Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	1.850.868.900	1.086.489.800	58,70
Nilai akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah	18.032.225.379	14.139.462.726	78,41
Jumlah	198.297.433.679	184.339.150.060	

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis T.A 2021 (diolah).



D. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi melihat sampai sejauh mana capaian sasaran/indikator terhadap realisasi anggaran pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel. 3.16 sebagai berikut:

Tabel. 3.16

Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Efisiensi Tahun 2022 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu

Sasaran/Indikator		Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
Tersedianya layanan infrastruktur permukiman yang sehat dan aman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	99,36%	95,33%	4,03%
Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas	Rasio permukiman layak huni	102,47%	74,95%	27,52%
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	98,55%	90,60%	7,95%
Meningkatnya kontribusi non migas terhadap perekonomian daerah	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	20,00%	50,70%	-30,70%
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	BB (104,23 %)	78,41%	25,82%

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu T.A 2022 (diolah).





BAB IV PENUTUP





BAB IV P E N U T U P

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan 4 (empat) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Hanya ada beberapa indikator yang tidak optimal didalam pencapaian sasaran, penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Namun demikian, untuk tahun 2022, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis fokus terhadap urusan pelayanan wajib yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur Perumahan khususnya penyediaan Rumah Layak Huni yang merupakan amanah undang-undang dan penyediaan Prasarana Utilitas Umum bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.
2. Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi fokus utama, hal tersebut dikarenakan pentingnya lingkungan hidup yang sehat, berkesinambungan serta layak bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.
3. Pertanahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, kedepan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berkomitmen didalam penanganan sengketa tanah mengutamakan dilakukan melalui mediasi dan *preventive*.
4. Komitmen Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Bengkalis terhadap pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lebih baik dan dapat dilaksanakan pada kegiatan yang ada setiap tahunnya.